

Wawancara Bersama Ahmad Gaus AF

Perkembangan Pemikiran Islam dan Gagasan Islam Progresif di Indonesia

*Seorang pemikir dan penulis muda yang aktif bergiat di kelompok intelektual muda di Jakarta, **Ahmad Gaus AF**, telah mengadakan siri lawatan ke Singapura pada Mac/April 2007. Beliau, yang kini bertugas selaku Direktur Publikasi di LibforAll Foundation dan juga dosen di Swiss German University di Jakarta, adalah seorang tokoh yang aktif bergiat di dalam mengedepankan gagasan-gagasan progresif dan pemikiran-pemikiran baru di kalangan anak muda di Indonesia. Terdidik di pesantren dan kemudian menerima pendidikan sains sosial dan politik, Ahmad Gaus juga pernah bergiat di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Indonesian Institute for Civil Society (INCIS), Jakarta.*

*Ahmad Gaus pernah bertugas di Yayasan Paramadina selaku Program Officer dan telah bertanggungjawab menghasilkan sejumlah besar karya-karya tulisan pemikir Islam tersohor di Indonesia, almarhum Dr. Nurcholish Madjid (Cak Nur). Kini, beliau sedang berusaha menerbitkan biografi rasmi Cak Nur. Beliau sendiri telah menghasilkan beberapa karya yang diredaksi bersama beberapa tokoh intelektual terkemuka Indonesia, termasuk rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Prof. Komaruddin Hidayat. Antara karya-karya yang telah diterbitkan ialah **Passing Over: Melintasi Batas Agama** (1998), **Fiqih Lintas Agama** (2003), **Islam, Negara & Civil Society** (2004) dan **Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Nusantara** (2006).*

*Berikut adalah wawancara bersama beliau, hasil dari kunjungan beliau ke Singapura pada awal bulan **April 2007**.*

WAWANCARA

Bersama Ahmad Gaus AF
Aktivis, Paramadina

Perkembangan Islam di Indonesia memang sesuatu yang amat menarik dan penting diamati. Bolehkah saudara Gaus ceritakan perkembangan terkini wacana Islam di Indonesia?

Gaus: Sejak rezim otoritarian di Indonesia tumbang pada tahun 1998, berbagai gerakan dan kekuatan Islam muncul ke permukaan menegaskan identitas diri mereka masing-masing. Selama 32 tahun di bawah rezim Suharto, gerakan-gerakan Islam ditekan dan ditindas karena ekspresi Islam selalu diidentitikan dengan Islam ekstrim yang ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan mendirikan Negara Islam.

Tekanan Suharto itu ternyata tidak mematikan gerakan mereka. Malah, justru semakin menimbulkan militansi di tingkat pengkaderan karena ada ideologi yang mengukuhkan mereka untuk terus berjuang bersama menegakkan agama Allah yang dizalimi oleh rezim sekuler Suharto. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kelompok-kelompok pengajian tertutup di lingkungan kampus sekuler yang tema mereka selalu berkisar pada bagaimana menegakkan nilai-nilai Islam yang suci dalam negara yang otoriter dan sekuler. Kelompok-kelompok inilah yang kemudian menjadi pendukung utama kekuatan politik Islam fundamentalis, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengusung ideologi Islam.

Tapi PKS bukan satu-satunya gejala ini. Di luar partai politik Islam, juga terdapat banyak sekali gerakan-gerakan Islam yang muncul pasca tumbangannya rezim otoriter Suharto. Meski identitas mereka berbeda-beda, namun mereka memperjuangkan hal yang sama, yaitu menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara, karena selama tiga dekade Indonesia diatur oleh rezim sekular, terbukti Indonesia bangkrut. Jadi gerakan-gerakan ini semula adalah reaksi terhadap krisis yang menimpa Indonesia, dimana mereka menawarkan Islam sebagai solusi.

Masalahnya adalah bahwa mereka—gerakan-gerakan Islam itu—tidak mewakili keseluruhan umat Islam Indonesia. Sebagian besar umat Islam Indonesia pasti menolak mengganti dasar Negara Pancasila dengan Islam, sekalipun mereka tahu bahwa selama rezim otoriter berkuasa, Pancasila juga diperas dan diberi tafsir sendiri oleh rezim. Penguasa adalah pemegang satu-satunya lisensi tafsir atas ideologi Pancasila. Itu yang menyebabkan Pancasila menjadi semacam teks tertutup yang dikeramatkan dan menolak yang lain, bahkan melihat yang lain sebagai musuh yang harus dilenyapkan. Pada waktu itu, musuh utamanya adalah

komunisme, tapi kemudian juga melebar kepada ideologi-ideologi lain yang dianggap mengancam Pancasila sebagai dasar negara, termasuk Islam. Maka gerakan-gerakan Islam pada masa Suharto praktis dibungkam. Akibatnya mereka bersembunyi di bawah tanah. Tapi tidak mati.

Nah, gerakan Reformasi 1998 yang berhasil menjatuhkan rezim otoriter Suharto itu, yang kemudian disusul dengan dibukanya ruang publik, menjadi arena yang sangat bebas untuk memperdebatkan kembali keabsahan Pancasila. Dalam ruang itulah Islam kembali dibawa masuk ke dalam arena politik oleh kalangan politikus dan aktivis Islam militan. Maka ketika kebebasan politik dibuka, segera saja puluhan partai politik berasaskan Islam didirikan untuk ikut serta dalam pemilihan umum (Pemilu). Mereka berpikir bahwa asas Islam masih bisa dijadikan alat pemersatu umat dalam politik. Kita bersyukur bahwa Pancasila benar-benar diuji secara objektif; apakah ia masih diinginkan oleh bangsa Indonesia—yang sebagian besar beragama Islam—untuk tetap menjadi ideologi dan dasar negara, ataukah mau diganti dengan ideologi yang lain, seperti Islam.

Lalu kita menyaksikan bahwa dalam dua kali pemilihan umum, partai-partai Islam selalu kalah. Ini menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia lebih suka menghayati Islam di ruang batin mereka, dalam hubungan personal dengan Tuhan dan dalam urusan muamalah di masyarakat. Dalam konteks ini, Islam begitu hidup dan bersemangat menjadi inspirasi berbagai aktivitas umat. Syiar Islam sangat ramai dan muncul dalam aktivitas ekonomi, karya intelektual, ekspresi seni, dan artikulasi budaya pop. Lihat saja di televisi-televisi Indonesia; sebagian besar filem-filem sinetron terilhami oleh ajaran Islam. Azan sholat setiap waktu dikumandangkan dan diumumkan di semua stasiun televisi. Pendeknya, ekspresi Islam sangat bebas di negeri ini. Dan semua orang menikmati serta menghormatinya. Tapi ketika Islam mulai dibawa ke politik dan dijadikan ideologi tandingan terhadap dasar negara dan hukum positif yang memayungi segenap rakyat Indonesia yang sangat pluralistik, di sinilah muncul resistensi. Jika dulu resistensi itu dilakukan oleh negara otoriter dengan alat-alat kekerasan, maka sekarang, setelah kita memiliki demokrasi, resistensi itu muncul dari kalangan umat Islam sendiri.

Salah satu hasil dari gerakan reformasi 1998 adalah bahwa *civil society* tumbuh dengan baik dan menjadi tulang punggung dari kelangsungan negara. Di kalangan *civil society* terjalin ikatan-ikatan keadaban (*bond of civility*) yang mulai belajar untuk saling menumbuhkan toleransi dan persaudaraan sejati, bukan toleransi semu sebagaimana pada masa rezim otoriter berkuasa. Ketika itu orang bersikap toleran karena takut pada negara yang merasa perlu menjaga stabilitas keamanan demi mengamankan pembangunan ekonomi. Sekarang ini, toleransi di antara

umat beragama lahir sebagai tanggungjawab bersama yang tulus sebagai sesama bangsa. Di bawah rezim otoriter yang kejam dan tidak peduli dengan suara hati nurani rakyat, semua kelompok masyarakat dirugikan dan menjadi korban, jadi bukan hanya umat Islam. Saya kira masyarakat Indonesia saat ini sudah belajar untuk memperkuat diri mereka dari intervensi rezim yang otoriter dengan cara membangun solidaritas di antara berbagai kelompok. Karena kita tahu bahwa selama kaum otoriter berkuasa, mereka sering memanfaatkan sentimen perbedaan agama untuk mengadu domba, untuk kemudian rezim tampil sebagai penengah dan dengan cara itu, mereka mengamankan status quo kekuasaan, karena semua kelompok masyarakat sangat tergantung kepada rezim.

Saat ini, masyarakat sudah makin mandiri di hadapan kekuasaan. Hal ini dimungkinkan karena *civil society* berkembang cukup baik. Mereka sangat sensitif terhadap isu yang memecah belah bangsa. Itulah sebabnya, ketika isu Islam dimunculkan sebagai alternatif terhadap ideologi Pancasila yang mempersatukan pluralitas bangsa, mereka akan menolaknya. Mereka sangat mencintai Islam, justru karena itu mereka menolak Islam diseret ke dalam pertarungan politik dan ideologi.

Mayoritas umat Islam Indonesia tidak akan bisa dibodohi dengan klaim-klaim agama para petualang politik yang ingin menjadikan agama sebagai alat untuk meraih dukungan. Sekali lagi, dua kali pemilihan umum dalam sepuluh tahun terakhir, kekuatan Islam politik selalu kalah. Ini membuktikan bahwa umat Islam Indonesia tidak senang Islam dibawa-bawa ke arena politik. Sejak awal masuk ke wilayah Nusantara, Islam merupakan kekuatan kultural dan akan tetap menjadi kekuatan kultural. Dalam sejarah Indonesia, Islam politik selalu tersisih dan kalah, tapi sebagian politikus Muslim masih saja bermain-main dengan sentimen agama. Mungkin karena mereka dungu, tidak membaca sejarah, atau karena tidak memiliki program yang jelas untuk memajukan masyarakat sehingga mereka pikir lebih mudah menawarkan surga.

Sebagian besar umat Islam Indonesia percaya bahwa hidup di negara Pancasila (bukan Negara Islam) tidak mengurangi kualiti keislaman mereka. Apalagi sejak dulu mereka hidup dalam budaya dan tradisi yang berbeda-beda yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai Maluku, dan Nusa Tenggara. Mereka percaya dengan nilai Islam yang universal, namun mereka memiliki ekspresi keagamaan yang bersifat lokal. Dan ini sudah berlangsung berabad-abad. Jika sekarang hal ini mau diseragamkan atas nama penerapan syariat Islam, jelas tidak mungkin, karena ekspresi syariat Islam pun berbeda-beda dari satu budaya ke budaya yang lain. Yang tampak jelas dalam setiap diskursus untuk menjadikan syariat sebagai solusi adalah kepentingan politik sekelompok orang, dan bukan semua orang Islam. Karena itu wacana penerapan syariat Islam adalah wacana politik, yakni politisasi syariat.

Inilah yang berbahaya. Itu sebabnya, di antara sebagian besar umat yang diam, terdapat sekelompok anak muda dari NU dan Muhammadiyah yang muncul untuk menyelamatkan Islam dari pembajakan kelompok-kelompok radikal yang ingin memaksakan kehendak untuk menciptakan kondisi yang menurut mereka “lebih Islami” dengan cara menerapkan syariat Islam melalui instrumen negara yang justru menjadi milik semua kelompok.

Kelompok muda yang saya maksudkan inilah yang kemudian menyebut diri “Islam liberal”. Nama ‘liberal’ memang akhir-akhir ini jelek sekali di Indonesia. Hal ini karena keberhasilan kampanye kelompok fundamentalis yang menyerang Islam liberal sebagai “antek-antek Barat” dan “ingin melepaskan Islam dari syariat”. Kampanye ini dilakukan di masjid-masjid pada saat khutbah Jumaat dan dalam pamflet serta media massa milik kaum fundamentalis.

Tapi apakah artinya sebuah nama. Apa yang disuarakan kelompok Islam liberal sesungguhnya adalah apa yang hidup dan menjadi kesadaran umat Islam Indonesia sejak dulu. Yakni, menghargai perbedaan keyakinan dan pandangan, menjunjung tinggi toleransi, menghindari cara-cara kekerasan, dan mendorong kebebasan berpikir.

Islam liberal bukan antek Barat, dan mereka tidak anti syariat, justru yang mereka lakukan adalah menyelamatkan syariat Islam dari politisasi kelompok tertentu di dalam Islam. Kelompok Islam liberal mendorong umat Islam untuk berpikir terbuka terhadap teks-teks agama hasil dari proses sejarah. Mereka mengedepankan semangat kritis dan intelektualitas. Mereka sangat menghargai ijtihad.

Jadi, terlepas apakah namanya Islam liberal atau bukan, nilai-nilai yang diperjuangkan anak-anak muda Muslim itu—kebanyakan mereka berasal dari pondok pesantren dan sebagian adalah alumnus universitas di Timur Tengah—adalah nilai perdamaian, kebebasan beragama, toleransi, pluralisme, demokrasi, dan penghargaan terhadap kesetaraan laki-laki dan wanita. Semua itu adalah nilai-nilai liberal, disebut demikian ataupun tidak.

Sekarang ini, kekata Islam Progresif juga sering dilaung-laungkan di rantau ini. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Islam Progresif itu dan apakah inisi wacananya?

Gaus: Islam progresif sebenarnya hampir setara dengan Islam liberal. Agenda yang diperjuangkannya sama belaka. Namun karena kampanye Islam fundamentalis berhasil meraih simpati massa Islam untuk membenci Islam

liberal, maka sebagian besar orang Islam tidak mau disebut Islam liberal; mereka lebih suka mengidentifikasi diri sebagai Muslim progresif. Kelompok seperti ini banyak sekali, tapi mereka tidak merasa nyaman dengan kata 'liberal' yang disandangkan kepada agenda yang mereka kerjakan. Bagi saya, apapun sebutannya tidak masalah. Yang jelas mereka—terdiri dari para cendekiawan, dosen, penulis, aktivis, mahasiswa, peneliti, dan lain-lain—bekerja untuk Islam yang damai, sebagai antitesis terhadap wajah Islam yang keras dan kasar yang diperlihatkan oleh kelompok-kelompok radikal yang selalu berusaha memaksakan keyakinan dan kebenaran kepada orang lain atau kelompok lain, bahkan dengan cara-cara kekerasan seperti menyerang dan menghancurkan rumah-rumah ibadah agama lain. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa keberhasilan kaum fundamentalis dalam menstigmatisasi "Islam liberal" hanyalah keberhasilan semu dan bersifat superfisial. Nyatanya, kaum Muslim tidak mengubah posisi mereka, melainkan hanya berganti baju, dari yang warnanya mencolok menjadi lebih lembut.

Islam progresif juga berarti Islam yang berorientasi ke masa depan. Ini penting dikatakan karena memang ada tendensi keislaman yang berorientasi ke masa lalu, menjadikan masa lalu sebagai idealisasi yang ingin diwujudkan di masa kini.

Mereka menyerukan kembali ke Islam awal yang murni. Inilah inti dari ideologi kebangkitan Islam itu. Islam progresif tidak berbicara tentang kebangkitan Islam. Mereka merumuskan tantangan-tantangan masa kini lalu menyusun jawaban untuk masalah tersebut dengan bantuan akal yang merupakan anugerah Tuhan yang paling besar kepada manusia.

Jadi, Islam progresif memiliki orientasi pada persoalan kontekstual dan mencari pemecahannya pada dialektika akal dan wahyu. Ia tidak bisa hanya bersandar pada wahyu yang terkurung dalam teks. Pesan wahyu harus ditarik keluar dari rumah teks dan bernegosiasi dengan konteks. Di sinilah peranan akal.

Karena setiap persoalan bersifat kontekstual, maka agenda Islam progresif boleh berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain, disesuaikan kebutuhan lokal; sebab Islam progresif juga menghargai solusi lokal untuk persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat.

Islam progresif justru menolak paradigma tunggal yang mengklaim kebenaran di tangannya sendiri. Masing-masing masyarakat punya mekanisme, tradisi, pandangan dunia, dan cara untuk melihat suatu persoalan dan memecahkannya.

Islam progresif membantu mendorong perspektif yang bebas dan kritis. Suatu aturan atau nilai tidak bisa dipindahkan secara *copy paste* kepada masyarakat lain. Ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang bersemangat ingin menerapkan peraturan daerah (Perda Syariah Islam) tapi konsep-konsepnya langsung dijiplak dari daerah lain yang sudah menerapkan Perda serupa. Ini suatu kebodohan. Al-Qur'an saja menyatakan: *Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani kaumih liyubayyina lahum* (setiap rasul diutus dengan bahasa kaumnya sehingga kaumnya itu mengerti apa yang menjadi pesan sang rasul). Ini berarti bahwa suatu aturan harus benar-benar mengakar dalam masyarakat. Karena itu hendaknya, sebelum menerapkan suatu aturan, dilakukan riset yang mendalam tentang apa yang diinginkan masyarakat. Kalau tidak begitu, maka yang terjadi adalah pemaksaan kehendak. Ini sama saja dengan otoritarianisme dalam bentuk baru, yang muncul dengan baju agama. Karena menggunakan baju agama, maka pihak otoritas merasa berhak untuk melakukan tindakan apapun sekalipun itu melanggar hak asasi manusia.

Saya memperhatikan inilah yang terjadi dengan penerapan syariah Islam di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya, ada peraturan wanita harus memakai jilbab. Ini seharusnya tidak boleh terjadi. Orang mesti diberi kebebasan mau memakai jilbab atau tidak karena itu lahir dari kesadarannya. Tugas agamawan hanya menasihati, bukan memaksakan kehendak, apalagi dengan meminjam otoritas penguasa. Lagi pula, masalah jilbab masih kontroversial di kalangan ulama— artinya ada yang mewajibkan dan ada yang tidak. Ahli tafsir seperti Quraish Shihab saja tidak berpandangan bahwa itu wajib. Apalagi orang-orang seperti Nurcholish Madjid, KH Abdurrahman Wahid, Munawir Sjadzali, dan banyak lagi yang lain— mereka tidak memandang jilbab sebagai kewajiban agama bagi kaum wanita Muslim, meskipun mereka sangat menghargai para wanita yang berjilbab dengan sadar. Yang mereka tentang adalah pandangan yang mewajibkan jilbab sambil memandang yang tidak berjilbab sebagai bukan Muslimah yang baik atau belum sempurna Islamnya. Kalau anda perhatikan, sebenarnya kaum wanita Muslim Indonesia tidak terbiasa menggunakan jilbab seperti yang muncul dalam desain tertutup seperti sekarang. Mereka biasanya memakai kerudung terbuka yang diselendangkan di kepala. Ini sudah cukup memenuhi standar kesopanan yang menjadi prinsip di dalam berpakaian. Dan lebih penting lagi, inilah tradisi berpakaian ala Indonesia. Kaum laki-lakinya pun mengenakan sarung dan peci untuk ber-sholat, yang tidak terdapat di dunia Islam yang lain. Pakaian seperti jubah, sarban, lalu memanjangkan janggut, tidak dianggap sebagai ajaran agama, melainkan budaya Arab, dan karena itu tidak harus diikuti. Kalau janggut dianggap ajaran agama, bagaimana dengan kaum musyrik Mekah di masa lalu yang sangat membenci dan memusuhi Nabi Muhammad; bukankah janggut mereka juga panjang-panjang?

Sekarang ini, memang tampak ada gejala Arabisasi dalam Islam Indonesia. Sudah ada sebagian kecil umat Islam yang berpakaian dengan cara yang saya sebutkan di atas, yaitu memakai jubah, memanjangkan janggut, dan kaum perempuannya memakai jilbab tertutup. Tapi, kalau hal itu tidak sesuai dengan *nature* dan budaya berpakaian ala orang Indonesia, maka ia tidak akan bertahan lama. KH Abdurrahman Wahid sejak beberapa waktu yang lalu sudah melaungkan apa yang dia sebut “Pribumisasi Islam”, yaitu bahwa Islam harus diselaraskan dengan budaya pribumi, tidak perlu meniru-niru budaya Arab yang tidak mengakar di bumi Indonesia. Sementara itu, Nurcholish Madjid juga sangat konsisten dengan pikiran bahwa keislaman kita harus diberi konteks keindonesiaan. Artinya, unsur-unsur yang membentuk keindonesiaan seperti pluralisme, kebebasan beragama, demokrasi, kebangsaan, kesetaraan, harus menjadi agenda umat Islam Indonesia. Indonesia menjadi sebuah bangsa seperti sekarang ini karena perbedaan-perbedaan, bukan karena persamaan. Karena itu salah satu agenda Islam progresif adalah memberikan perspektif yang mendorong terbukanya wawasan umat Islam kepada persoalan-persoalan keindonesiaan di atas (pluralisme, kebebasan beragama, demokrasi, kebangsaan, dan kesetaraan). Agenda Islam progresif di Singapura dan Malaysia boleh berbeda disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan setempat.

[April 2007]

© The Reading Group, Singapore